

Analisis Pelaporan Berbasis Website untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat

An Analysis of Website Based Reporting for Improving Transparency and Accountability of Zakat Management Organisations

Yessi Fitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: yessi.fitri@uinjkt.ac.id

Rini Rini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: rini@uinjkt.ac.id

Amilin Amilin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: amilini@uinjkt.ac.id

artikel diterima 28 Juli 2023, diseleksi 26 Juli 2024,
disetujui 28 Juli 2024.

Abstrak: Fungsi perantara OPZ dalam menghimpun, mengelola, menyalurkan dana zakat mirip dengan lembaga perbankan. Perbankan mengikuti Peraturan OJK Nomor 08/ PJOK.04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik. Perusahaan publik harus membuat situs web yang memberikan informasi yang dapat dilihat oleh setiap orang yang memiliki akses internet setiap saat. Walaupun belum ada peraturan yang mewajibkan OPZ untuk menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan melalui website

namun berdasarkan Zakat Core Principles dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, OPZ perlu menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan di websitenya agar kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat, namun belum semua OPZ berskala nasional apalagi tingkat provinsi dan daerah mempublikasikan informasi tersebut melalui website. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaporan berbasis website yang dilakukan oleh OPZ berskala nasional untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas OPZ. Analisis konten digunakan untuk menganalisis transparansi yang diukur dengan Itranz sedangkan akuntabilitas diukur dengan indeks akuntabilitas Islam berbasis website. Penentuan masalah dan strategi prioritas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website dilakukan dengan metode Analytic Network Process (ANP). Penelitian ini menemukan bahwa tingkat transparansi OPZ melalui pelaporan berbasis website adalah 6% OPZ transparan, 55% cukup transparan, 29% kurang transparan dan 10% tidak transparan. Tingkat akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website adalah 13% OPZ akuntabilitasnya sangat tinggi, 16% tinggi, 7% menengah, 19% rendah, dan 45% sangat rendah. Masalah prioritas adalah kepatuhan terhadap peraturan dan hukum syariah dan strategi yang paling prioritas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website adalah standarisasi amil.

Kata Kunci: *Transparansi; akuntabilitas; OPZ; pelaporan; website.*

Abstract: *The intermediary function of OPZ in collecting, managing, distributing zakat funds is similar to banking institutions. Banking follows OJK Regulation Number 08/PJOK.04/2015 on the website of public companies. The public companies must create a website that provides information that can be viewed by any person who has internet access at any time. Although there is no regulation that requires OPZ to submit financial and non-financial information through the website, based on the Zakat Core Principles and Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, OPZ needs to submit financial and non-financial information on its website so that public trust in OPZ increases, but not all OPZ on a national scale, especially at the provincial and regional levels publish this information through the website.*

The purpose of this study is to analyse website-based reporting conducted by national-scale OPZs to increase OPZ transparency and accountability. Content analysis is used to analyse transparency as measured by Itranz while accountability is measured by the website-based Islamic accountability index. The determination of problems and priority strategies to improve OPZ transparency and accountability through website-based reporting is carried out using the Analytic Network Process (ANP) method. This study find that the level of OPZ transparency through website-based reporting is 6% transparent, 55% moderately transparent, 29% less transparent and 10% not transparent. The level of OPZ accountability through website-based reporting is 13% OPZ very high accountability, 16% high, 7% medium, 19% low, and 45% very low. The priority issue is compliance with sharia regulations and laws, and the most priority strategy in improving transparency and accountability of OPZ through website-based reporting is standardization of amil.

Keywords: *Transparency; accountability; OPZ; reporting; website.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar karena merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Namun administrasi zakat di Indonesia belum memadai sehingga potensi zakat belum dapat terealisasi¹. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Agama pada Rakornas Zakat 2023 bahwa dari 400 triliun potensi zakat yang ada, lembaga amil baru mampu mengumpulkan sekitar 21 triliun². Penelitian BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI) yang mengkaji pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi. Hasilnya, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada 2020 sebesar Rp61.258.712.487.476. Pilihan masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui OPZ resmi menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia yang tercatat jauh lebih rendah dari potensi yang ada.³

Hasil studi dari Bank Indonesia menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan Zakat di Indonesia. yaitu permasalahan sistem pengelolaan zakat, permasalahan internal lembaga zakat, permasalahan eksternal dimasyarakat. Secara lebih spesifik, hambatan sistem yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat adalah regulasi dan juga dukungan pemerintah yang kurang memadai. Kemudian, aspek internal terdiri dari tata kelola pengelolaan zakat yang kurang baik dan juga sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OPZ tidak memadai. Adapun pada faktor eksternal, literasi zakat masyarakat yang rendah serta masih banyaknya zakat yang disalurkan ke lembaga di luar lembaga zakat menjadi faktor rendahnya optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia.⁴

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat muslim dalam menunaikan kewajiban ZISnya melalui organisasi resmi atau formal (BAZNAS dan LAZ). Semakin tinggi kepercayaan umat terhadap OPZ maka akan semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi mereka untuk secara sukarela menyalurkan ZISnya ke OPZ formal.⁵

Isu transparansi menjadi hal yang sangat krusial bagi organisasi OPZ sebagai lembaga yang mengelola dana publik, karena hal ini akan berdampak langsung kepada baik atau buruknya reputasi OPZ secara sistemik. Organisasi internasional seperti IMF dan World Bank maupun organisasi internasional Islam seperti IFSB dan AAOIFI telah secara ketat mengimplementasikan transparansi laporan keuangan. Transparansi yang tinggi menurunkan risiko kegagalan pengelolaan lembaga keuangan. Transparansi yang baik meningkatkan kepercayaan publik atas tata kelola dana yang diamankan.⁶

Pusat Kajian Strategis BAZNAS telah mengeluarkan indeks transparansi OPZ. Indeks ini merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang diharapkan dapat menjadi standar minimum transparansi pengelolaan zakat di Indonesia. Indeks transparansi ini mengukur transparansi OPZ

pada tiga dimensi, yaitu transparansi keuangan, transparansi manajemen dan transparansi program. Indeks ini berbeda dengan indeks transparansi lainnya, karena disesuaikan dengan kaidah syariah yang berlaku pada tata kelola zakat dan amil zakat.⁷

Akuntabilitas badan amal sangat penting untuk menimbulkan, menjaga bahkan memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan. Akuntabilitas yang baik dan hubungan kepercayaan yang kuat menyediakan platform yang sangat diinginkan untuk menghindari skandal dan menjaga penyediaan sumber daya.⁸ Konsep akuntabilitas syariah yang tercantum dalam sharia enterprise theory (*hablumminallah, hablumminannas, dan hablumminal'alam*) dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan dengan mengunggah laporan keuangan pada website secara reguler.⁹

Sejumlah penelitian berkaitan dengan organisasi nirlaba yang menyediakan informasi melalui website untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan utama dan menjaga legitimasi. Pemicu penyediaan informasi melalui internet bagi organisasi nirlaba menunjukkan banyak kemiripan dengan yang ditemukan pada perusahaan yang berfokus laba. Namun, organisasi nirlaba hanya memasukkan sedikit informasi keuangan dan lebih fokus pada tujuannya.¹⁰

Badan amal menggunakan website untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja dan keuangan mereka dengan biaya terbatas untuk mendorong pihak pemberi sumbangan menyediakan uang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup badan amal tersebut.¹¹ Badan amal menggunakan situs website untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja dan keuangan mereka dengan biaya terbatas untuk mendorong pihak pemberi sumbangan menyediakan uang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup badan amal tersebut.¹²

Faktor penentu yang berkontribusi pada adopsi media sosial oleh lembaga zakat adalah manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan,

aksesibilitas, formalisasi, pelatihan, dorongan manajemen, dan dorongan publik.¹³ Penelitian tentang penerapan *Internet Financial Reporting* untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat menemukan bahwa sebagian besar OPZ belum memanfaatkan internet untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada masyarakat/ muzaki. Tingkat pengungkapan pelaporan keuangan ketujuh OPZ berdasarkan PSAK 109 masih rendah.¹⁴ Hasil penelitian yang lain menunjukkan temuan yang hampir sama yaitu belum ada satupun dari lembaga zakat yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan tata kelola amil melalui website dan hanya satu yang memenuhi kriteria pengungkapan sangat tinggi yaitu Baznas. Sementara, dari 9 lembaga zakat swasta terdapat 5 lembaga zakat yang memiliki tingkat pengungkapan website di atas 60%, sisanya 3 lembaga zakat yang memiliki tingkat pengungkapan website 50% kebawah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat publikasi informasi keuangan dan nonkeuangan lembaga zakat melalui internet masih rendah.¹⁵

Penelitian yang secara khusus menganalisis pelaporan berbasis website pada OPZ berskala nasional untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dan mengkaji masalah prioritas yang dihadapi OPZ serta strategi prioritas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website belum penulis temukan. Untuk membahas transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website, penulis menggunakan analisis konten. Analisis konten merupakan metode yang digunakan secara sistematis untuk mengevaluasi simbol isi, lambang atau pesan yang tercatat atau terekam, kemudian diberi interpretasi.¹⁶ Variabel transparansi pada penelitian ini diukur menggunakan indeks transparansi OPZ¹⁷ sedangkan variabel akuntabilitas menggunakan indeks akuntabilitas Islam berbasis website yang diadopsi dari penelitian Dainelli¹⁸, Sarman¹⁹ dan Siswantoro²⁰. Teknis analisis data berkaitan dengan masalah dan strategi prioritas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ berbasis website menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dan diolah

dengan menggunakan software “Super Decision”. Metode penelitian ANP memiliki 3 tahapan kerja yaitu membuat kerangka kerja ANP atau konstruksi model, kuantifikasi model dan sintesis dan analisis²¹

B. Hasil dan Pembahasan

Terdapat 36 OPZ berskala nasional yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang terdapat didalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-15/PJ/2022²², dengan perincian: 1 OPZ berbentuk Badan Amil Zakat, 33 Lembaga Amil Zakat dan 2 Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Penelitian ini menganalisis transparansi dan akuntabilitas OPZ berbasis website sehingga alamat website menjadi hal yang harus peneliti peroleh. Setelah memeriksa website masing – masing OPZ didapatkan data OPZ yang tidak memiliki website sebanyak 2 OPZ, OPZ yang mempunyai website sebanyak 34, dari 34 website OPZ ini terdapat 1 website (yang tidak bisa diakses yaitu website Yayasan Global Zakat dan 2 website yang tidak mencantumkan informasi tentang zakat, sehingga OPZ yang dianalisa websitenya sebanyak 31 OPZ (86%) dari seluruh OPZ berskala nasional.

1. Transparansi OPZ

Variabel transparansi pada penelitian ini menggunakan indeks transparansi OPZ²³. Pengolahan data transparansi menggunakan model Multi-Stage Weigh Index. Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan untuk transparansi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui identifikasi informasi yang diungkapkan OPZ melalui website
2. Memberikan bobot pada masing – masing dimensi penyusun indeks
3. Melakukan perhitungan indikator transparansi pada Badan/ Lembaga Zakat berskala nasional, selanjutnya menganalisis dan

menginterpretasikan kemudian membandingkan transparansi Badan/Lembaga Zakat berskala nasional.

a. Indeks transparansi keuangan (I-TK01)

$$(01) = D_1^1 (V_1^1 \times S + V_1^2 \times S)$$

b. Indeks Transparansi manajemen (I-TM02)

$$(02) = D_2^2 (V_2^3 \times S + V_2^4 \times S + V_2^5 \times S + V_2^6 \times S)$$

c. Indeks Transparansi Program (I-TP03)

$$(03) = D_3^3 (V_3^7 \times S + V_3^8 \times S + V_3^9 \times S)$$

d. Indeks transparansi badan/ lembaga zakat berskala nasional

$$\text{Itranz} = (\text{I-TK01}) + (\text{I-TM02}) + (\text{I-TP03})$$

4. Mengkategorikan hasil dari perhitungan indeks dengan rentang nilai 0.00 – 1.00 yang berarti jika nilai indeks semakin mendekati 1.00, maka semakin baik tingkat transparansi di suatu OPZ. Adapun klasifikasi penilaian indeks pada tabel 1.

Tabel 1. Rentang Nilai serta Kategori Penilaian pada Indeks
Transparansi OPZ

No	Skor	Kriteria
1	0,00 – 0,25	Tidak transparan
2	0,26 – 0,50	Kurang transparan
3	0,51 – 0,75	Cukup transparan
4	0,76 – 1,00	Transparan

Sumber: Puskas Baznas²⁴

5. Membuat kesimpulan dari hasil analisis penelitian.

Setelah data dikumpulkan dan diolah, diperoleh tingkat transparansi OPZ berbasis website yang diukur dengan indeks transparansi zakat yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Transparansi OPZ Berbasis Website

No.	Nama OPZ	Itranz	Kategori
1.	Badan Amil Zakat Nasional	0,97	Transparan
2.	AZ Inisiatif Zakat Indonesia	0,83	Transparan
3.	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar	0,75	Cukup Transparan
4.	LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)	0,74	Cukup Transparan
5.	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	0,74	Cukup Transparan
6.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah	0,73	Cukup Transparan
7.	Yayasan Baitul Maal Muamalat	0,70	Cukup Transparan
8.	Yayasan Mandiri Amal Insani	0,68	Cukup Transparan
9.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)	0,68	Cukup Transparan
10.	Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII)	0,66	Cukup Transparan
11.	Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat	0,63	Cukup Transparan
12.	Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia	0,61	Cukup Transparan
13.	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah	0,60	Cukup Transparan
14.	Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	0,60	Cukup Transparan
15.	Yayasan Panti Yatim Indonesia Al Fajr	0,59	Cukup Transparan

16.	Yayasan Yatim Mandiri	0,58	Cukup Transparan
17.	Yayasan Mizan Amanah	0,57	Cukup Transparan
18.	Yayasan Daarut Tauhid	0,55	Cukup Transparan
19.	LAZ Nurul Hayat	0,51	Cukup Transparan
20.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	0,49	Kurang Transparan
21.	Yayasan Membangun Keluarga Utama	0,48	Kurang Transparan
22.	Yayasan Daarul Qur'an Nusantara	0,47	Kurang Transparan
23.	Yayasan Sahabat Yatim Indonesia	0,47	Kurang Transparan
24.	LAZ Baitul Maal Hidayatullah	0,42	Kurang Transparan
25.	Yayasan Waqaf Infaq Zakat dan Sodaqoh Pesantren	0,40	Kurang Transparan
26.	Yayasan Wakaf Djalaludin Pane	0,39	Kurang Transparan
27.	Yayasan Wahdah Islamiyah	0,33	Kurang Transparan
28.	Yayasan Kesejahteraan Madani	0,26	Kurang Transparan
29.	Yayasan Hadji Kalla	0,21	Tidak Transparan
30.	Yayasan LAGZIS Peduli	0,21	Tidak Transparan
31.	Al Irsyad Al Islamiyyah	0,20	Tidak Transparan

Sumber: Data diolah, 2023

OPZ yang transparan sebanyak 6%, cukup transparan 55%, kurang transparan 29% dan tidak transparan sebanyak 10%. OPZ yang paling tinggi indeks transparansinya adalah BAZNAS dengan nilai Itranz 0,97.

Nilai Itranz BAZNAS hampir 100% yang menunjukkan bahwa BAZNAS transparan, hal ini karena BAZNAS menekankan pentingnya tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan menerapkan prinsip 3A, yakni aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. BAZNAS juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan kedisiplinan²⁵. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan hanya satu lembaga yang memenuhi kriteria pengungkapan sangat tinggi yaitu Baznas²⁶ sedangkan OPZ yang paling rendah indeks transparansinya yaitu Al Irsyad Al Islamiyah dengan nilai Itranz 0,20 dan termasuk kedalam kategori tidak transparan. Website Al Irsyad Al Islamiyah hanya berisi update berita dan tidak menginformasikan tentang tranparansi keuangan, transparansi manajemen dan transparansi program. OPZ hendaknya meningkatkan transparansi karena transparansi yang paling berkontribusi terhadap tata kelola yang baik²⁷. Transparansi pengelolaan zakat memiliki pengaruh signifikan pada minat muzaki untuk membayar zakat melalui OPZ²⁸, transparansi laporan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi melalui OPZ²⁹, transparansi mampu mempengaruhi secara signifikan dan positif tingkat kepercayaan muzaki³⁰.

2. Akuntabilitas OPZ

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban segala amanah kepada pemberi amanah. Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses akuntansi. Instrumen penelitian untuk akuntabilitas adalah indeks akuntabilitas Islam berbasis website pada tabel 3.

Tabel 3. Item Indeks Akuntabilitas Islam Berbasis Website

Dimensi	Indikator
Keuangan	Laporan keuangan
	Catatan atas laporan keuangan
	Laporan auditor independen

	Informasi distribusi dana zakat	
	Daftar Muzaki	
	Komposisi dan struktur manajemen	
	Informasi dewan syariah	
	Pernyataan Manajemen	
Kinerja	Hasil pengumpulan dan distribusi zakat	
	Visi/ Misi OPZ	
	Rencana Strategis	
	Saran dari penerima manfaat	
	Efektivitas dan evaluasi program	
	Program peningkatan kompetensi karyawan	
	Kode etik dan peraturan karyawan	
	Informasi tata kelola	
	Indikator Kinerja Utama	
	Hasil Kegiatan Penelitian	
	Pengakuan/ Penghargaan yang diperoleh OPZ	
	Survey pengunjung website	
	In f o r m a s i Publik	Informasi distribusi dana zakat
		Pernyataan Direktur OPZ
Informasi persentase dana yang digunakan untuk pemberdayaan sosial		
Tanggapan terhadap saran		
Deskripsi program dan kegiatan		
Remunerasi amil		
Keterlibatan	Akses dan kesediaan kontak	

	Pembayaran zakat secara online
	Update dan berita organisasi
	Pertanyaan yang sering ditanyakan
Aspek Islam	Kepatuhan syariah
	Kepatuhan terhadap peraturan
	Opini Syariah
	Tata kelola anti penyuapan/ gratifikasi

Sumber: Diadopsi dari penelitian Dainelli³¹, Sarman³² dan Siswantoro³³.

Teknik analisis data yang digunakan untuk akuntabilitas dengan melakukan identifikasi informasi yang diungkapkan OPZ berdasarkan item indeks akuntabilitas Islam berbasis website. Konten yang relevan pada indeks pengungkapan informasi keuangan pada OPZ akan diberikan penilaian menggunakan skala dummy. Jika informasi diungkapkan diberi angka 1, jika tidak diungkapkan diberikan angka 0. Angka tersebut akan disajikan dalam bentuk persentase. Persentase tingkat pengungkapan akan ditemukan melalui rumus sebagai berikut:³⁴

$$\text{Tingkat pengungkapan} = \frac{\sum X}{n} \times 100\%$$

$\sum X$ = jumlah item informasi keuangan yang diungkapkan melalui situs website

n = jumlah item informasi keuangan yang harus diungkapkan melalui situs website yaitu sebanyak 34 item.

Berdasarkan kriteria tingkat akuntabilitas maka dapat diinterpretasikan dan diranking akuntabilitas OPZ berbasis website seperti ditampilkan pada tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Akuntabilitas OPZ Berbasis Website

No.	Nama OPZ	% Pengungkapan	Tingkat Pengungkapan
1.	Badan Amil Zakat Nasional	88,24%	Sangat Tinggi

2.	LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)	85,29%	Sangat Tinggi
3.	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia	82,35%	Sangat Tinggi
4.	Yayasan Mandiri Amal Insani	82,35%	Sangat Tinggi
5.	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	76,47%	Tinggi
6.	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar	73,53%	Tinggi
7.	Yayasan Baitul Maal Muamalat	73,53%	Tinggi
8.	Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia	73,53%	Tinggi
9.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah	73,53%	Tinggi
10.	LAZ Nurul Hayat	61,76%	Menengah
11.	Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat	61,76%	Menengah
12.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)	58,82%	Rendah
13.	Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	55,88%	Rendah
14.	Yayasan Panti Yatim Indonesia Al Fajr	55,88%	Rendah
15.	LAZ Baitul Maal Hidayatullah	52,94%	Rendah
16.	Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII)	52,94%	Rendah

17.	Yayasan Mizan Amanah	50,00%	Rendah
18.	Yayasan Wahdah Islamiyah	47,06%	Sangat Rendah
19.	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah	44,12%	Sangat Rendah
20.	Yayasan Yatim Mandiri	44,12%	Sangat Rendah
21.	Yayasan Daarul Qur'an Nusantara	44,12%	Sangat Rendah
22.	Yayasan Daarut Tauhid	41,18%	Sangat Rendah
23.	Yayasan Sahabat Yatim Indonesia	41,18%	Sangat Rendah
24.	Yayasan Membangun Keluarga Utama	41,18%	Sangat Rendah
25.	Yayasan Wakaf Djalaludin Pane	38,24%	Sangat Rendah
26.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	32,35%	Sangat Rendah
27.	Yayasan Waqaf Infaq Zakat dan Sodaqoh Pesantren	32,35%	Sangat Rendah
28.	Yayasan Hadji Kalla	29,41%	Sangat Rendah
29.	Yayasan Kesejahteraan Madani	23,53%	Sangat Rendah
30.	Yayasan LAGZIS Peduli	14,71%	Sangat Rendah
31.	Al Irsyad Al Islamiyyah	8,82%	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah, 2023

Terdapat 13% OPZ yang akuntabilitas berbasis websitenya sangat tinggi, 16% tinggi, 27% menengah, 19% rendah dan 45% sangat rendah. OPZ yang paling tinggi tingkat akuntabilitasnya adalah BAZNAS dengan prosentase pengungkapan sebanyak 88,24% dan termasuk kedalam kategori sangat tinggi sedangkan OPZ yang akuntabilitasnya sangat

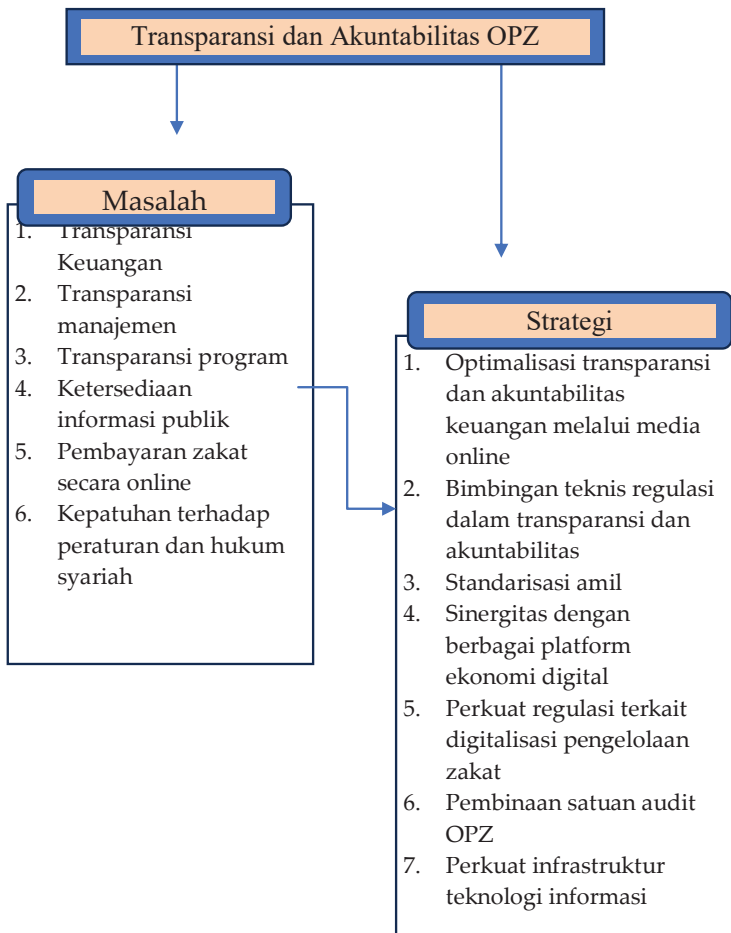
rendah adalah Al Irsyad Al Islamiyah dengan prosentase pengungkapan sebesar 8,82% dan termasuk kedalam kategori OPZ yang akuntabilitas melalui pelaporan berbasis websitenya sangat rendah. Website Al Irsyad Al Islamiyah hanya berisi update berita dan tidak menginformasikan tentang keuangan, kinerja, informasi publik, kerlibatan dan aspek Islam. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan sebagian besar institusi waqaf tunai tidak memiliki indeks akuntabilitas yang tinggi³⁵, kecenderungan pengungkapan akuntabilitas berbasis website organisasi sosial umumnya rendah³⁶, dari 19 OPZ yang ada di Indonesia hanya satu badan yang menerapkan pelaporan keuangan melalui internet, akuntabilitas Islam dari OPZ dapat dikatakan masih rendah³⁷.

Akuntabilitas yang baik dan hubungan kepercayaan yang kuat menyediakan platform yang sangat diinginkan untuk menghindari skandal dan menjaga penyediaan sumber daya³⁸. Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur utama dari tata kelola yang baik. Tata kelola dan pencegahan kecurangan secara signifikan mempengaruhi kinerja institusi zakat³⁹. OPZ dapat menyediakan saluran pengaduan dan portal informasi dan dokumentasi publik di websitenya.

3. Analisis Masalah dan Strategi

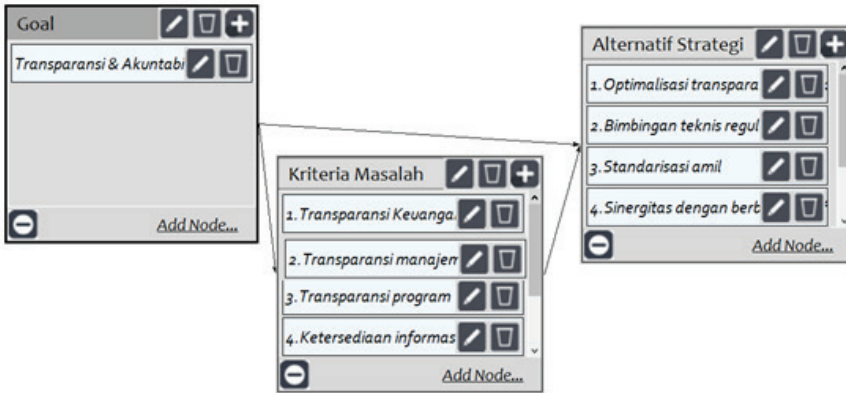
Analisis masalah dan strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Kerangka jaringan ANP pada kajian ini diawali dengan menentukan variabel-variabel masalah transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website yang didasarkan kepada beberapa kajian terdahulu dari berbagai jurnal, buku dan lain-lain, kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya (kriteria, kluster dan node). Variabel-variabel yang telah dihimpun dijadikan bahan wawancara mendalam dengan informan penelitian, yaitu; akademisi, regulator dan praktisi (pengelola amal zakat) untuk mengkaji informasi secara lebih dalam dengan tujuan

untuk memastikan variabel-variabel apa saja yang sangat penting dalam permasalahan dan strategi transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website. Diperoleh variabel-variabel yang sesuai dengan kajian ini, maka disusunlah jaringan dalam bentuk jaringan kompleks dengan alasan karena banyaknya masalah dalam transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website, oleh karena itu perlu ditentukan prioritas masalah dan strategi. Adapun kerangka jaringan seperti terlihat pada gambar 1.



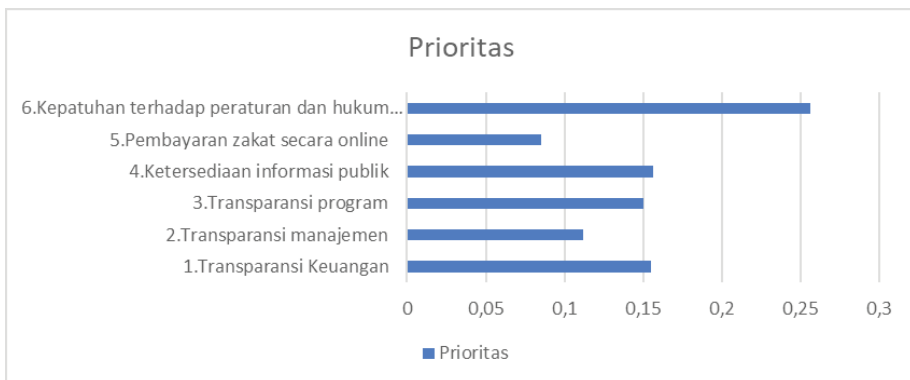
Gambar 1. Kerangka Jaringan Model ANP Masalah dan Strategi Transparansi dan Akuntabilitas OPZ Melalui Pelaporan Berbasis Website

Berdasarkan kerangka jaringan di atas, maka disusunlah jaringan kompleks berdasarkan jaringan Analytic Network Process. Jaringan ini dibentuk melalui software Super Decision sehingga terbentuk jaringan pada gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Jaringan Model ANP melalui software *Super Decision*

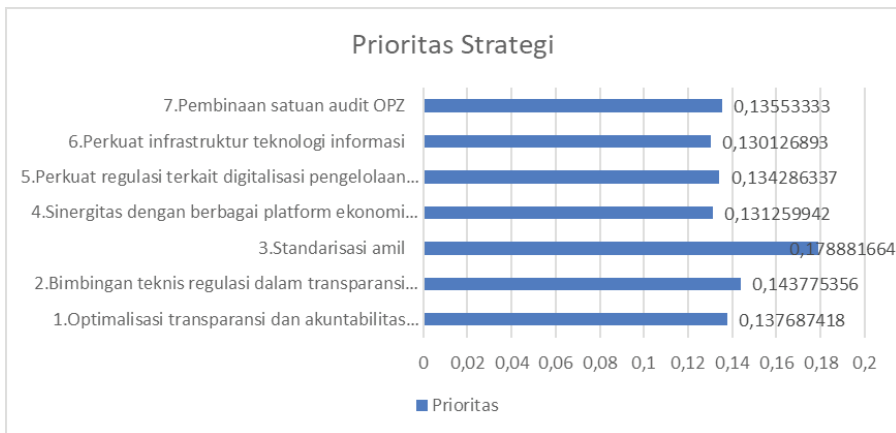
Data yang diolah dari masing-masing informan menghasilkan dua supermatriks yang memberikan urutan prioritas aspek-aspek terpenting, yaitu aspek masalah, dan strategi yang tepat menurut pendapat masing-masing informan. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui Software Super Decision diperoleh prioritas masalah menurut pendapat seluruh Informan sebagaimana terlihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Transparansi dan

Akuntabilitas OPZ Melalui Pelaporan Berbasis Website Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Gambar 3. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para informan, masalah transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website yang paling prioritas adalah masalah kepatuhan terhadap peraturan dan hukum syariah sebesar 27%, selanjutnya diikuti oleh masalah ketersediaan informasi publik sebesar 18%, diikuti oleh masalah transparansi keuangan sebesar 17%, masalah transparansi program sebesar 15%, masalah transparansi manajemen sebesar 12% dan yang menempati urutan terakhir adalah masalah pembayaran zakat secara online sebesar 9%. Untuk prioritas startegi menurut pendapat seluruh informan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Sintesis Prioritas Strategi

Gambar 4. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para informan (akademisi, regulator dan praktisi) strategi yang paling prioritas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website adalah standarisasi amil sebesar 17,89%, diikuti oleh bimbingan teknis regulasi dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan sebesar 14,38%, selanjutnya optimalisasi transparansi dan akuntabilitas keuangan melalui media online sebesar 13,77%, kemudian pembinaan satuan audit OPZ sebesar 13,55%, selanjutnya perkuat regulasi terkait digitalisasi pengelolaan zakat sebesar

13,43%, kemudian sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital sebesar 13,13% dan terakhir perkuat infrastruktur teknologi informasi sebesar 13,01%. Standarisasi amil sebagai prioritas strategi sejalan dengan penelitian yang menyatakan kompetensi sumberdaya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan⁴⁰. Penguasaan teknologi informasi oleh amil merupakan hal yang mutlak diperlukan jika OPZ secara sukarela menginformasikan transparansi dan akuntabilitasnya melalui website. Hal ini sejalan dengan strategi prioritas dalam penelian yang menguji optimalisasi tata kelola zakat di Jawa Timur yaitu dengan mengembangkan kemampuan amil untuk menggunakan teknologi dan meningkatkan jumlah amil yang menguasai teknologi⁴¹.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat transparansi Organisasi Pengelola Zakat melalui pelaporan berbasis website yang diukur dengan indeks transparansi OPZ adalah 6% OPZ transparan, 55% cukup transparan, 29% kurang transparan dan 10% tidak transparan. Tingkat akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat melalui pelaporan berbasis website yang diukur dengan indeks akuntabilitas Islam berbasis website adalah 13% OPZ akuntabilitasnya sangat tinggi, 16% tinggi, 7% menengah, 19% rendah, dan 45% sangat rendah. Masih rendahnya capaian transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat, memerlukan peran regulator yang mendorong pelaporan berbasis website, dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, sehingga muzaki dan calon muzaki menjadi lebih percaya bahwa OPZ menjalankan amanahnya dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website dapat dilakukan dengan memberikan informasi publik di website berkaitan dengan publikasi laporan keuangan secara tepat waktu, tata kelola OPZ, struktur organisasi, portal informasi dan dokumentasi publik, saluran pengaduan, aktivitas realtime baik untuk penghimpunan dan penyaluran, database muzaki dan mustahik,

data pengumpulan dan penyaluran. OPZ juga memberikan informasi berkaitan dengan kinerjanya di website. OPZ berskala nasional diharapkan berkomitmen untuk mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan berbasis website sehingga dapat menjadi contoh bagi OPZ berskala provinsi dan kabupaten/ kota, dengan hal ini diharapkan OPZ dapat lebih dipercaya oleh muzaki dan potensi zakat yang besar dapat dikumpulkan melalui lembaga resmi dan dapat digunakan secara optimal.

Masalah transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website berdasarkan pendapat gabungan informan yang paling prioritas adalah masalah kepatuhan terhadap peraturan dan hukum syariah dan strategi yang paling prioritas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ melalui pelaporan berbasis website adalah standarisasi amil. Regulator diharapkan lebih mendukung dan memfasilitasi OPZ dalam hal tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel seperti membantu pelaksanaan sertifikasi amil, memberikan bimbingan teknis, pembinaan satuan audit OPZ dan memperkuat regulasi terkait digitalisasi pengelolaan zakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zaimah, Mohd Hisham Mohd Sharif, Ram Al Jaffri Saad, Arifatul Husna Mohd Ariff, Md Hairi Md Hussain, and Mohd Herry Mohd Nasir. "Zakat Institutions' Adoption of Social Media." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0013>.
- Amalia, Euis. "Good Governance for Zakat Institutions in Indonesia: A Confirmatory Factor Analysis." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 27, no. 3 (2019): 1815–27.
- — —. "The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 162, no. Iclj 2017 (2018): 133–38. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>.
- Antonio, Muhammad Syafii, Sugiyarti Fatma Laela, Dhimas Mukhlas, and Al Ghifari. "Optimizing Zakat Collection in the Digital Era : Muzakki's Perception." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 235–54.
- Ascarya. "Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif." *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Di Universitas Trisakti*, 2005, 1–52.
- Ascarya, and Diana Yumanita. "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya." *Bank Sentral Indonesia*, 2018.
- Dainelli, Francesco, Giacomo Manetti, and Barbara Sibilio. "Web-Based Accountability Practices in Non-Profit Organizations: The Case of National Museums." *Voluntas* 24, no. 3 (2013): 649–65. <https://doi.org/10.1007/s11266-012-9278-9>.
- Direktur Jenderal Pajak. "Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

- Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat," 2022.
- Emzir, Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan 6. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Gandía, Juan L. "Internet Disclosure by Nonprofit Organizations: Empirical Evidence of Nongovernmental Organizations for Development in Spain." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 40, no. 1 (2011): 57–78. <https://doi.org/10.1177/0899764009343782>.
- Hikmaningsih, Hetty, and Bambang Agus Pramuka. "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari' Ah Enterprise Theory (Set)." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 9 (2020): 358–67. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>.
- Hule, Cynthia Van, and Nico Dewaelheyns. "Why Do Private Non-Profit Organization Provide Information On The Internet?" *Social Enterorise Journal* 10, no. 1 (2014): 69–86.
- Humas Baznas. "BAZNAS: Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun," 2020. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.
- — —. "Jaga Kepercayaan Masyarakat, BAZNAS Konsisten Terapkan Prinsip 3A Dalam Pengelolaan Zakat 1 Agustus 2022," 2022.
- Hyndman, Noel, and Danielle McConville. "Trust and Accountability in UK Charities: Exploring the Virtuous Circle." *British Accounting Review*, 2017, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.004>.
- Jayanto, Prabowo Yudo, and Siti Munawaroh. "The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Trust on Interest in Paying Zakat of Profession." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 59–69. <https://doi.org/10.15294/jda.v11i1.18729>.

- Junjunan, Mohammad Ilyas, M. Maulana Asef, and Moh Takwil. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzzaki Di Lembaga Amil Zakat Dompet Amah Umat." *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020): 112–25.
- Karim, Nina Karina, Elin Erlina Sasanti, Indria Puspitasari Lenap, and Nungki Kartika Sari. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 18, no. 2 (2019): 13–28.
- Kementrian Agama RI. "Rakornas Zakat 2023, Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat Nasional." [Kemenag.co.id](http://kemenag.co.id), 2023.
- Mubtadi, Novendi Arkham. "Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution." *Hasanuddin Economics and Business Review* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26487/hebr.v3i1.1544>.
- Nurlis, and Winwin Yudiati. "The Influence of Internal Control Effectiveness , Information Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City)." *Research Journal of Finance and Accounting* 8, no. 12 (2017): 111–24.
- Puskas BAZNAS. *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Puskas BAZNAS. Jakarta: Puskas Baznas, 2019.
- Rini, Rini. "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, no. 95 (2016): 288–306. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022>.
- Rossi, Gina, Chiara Leardini, and Stefano Landi. "The More You Know, The More You Give: Influence of Online Disclosure on European Community Foundations' Donations." *Nonprofit Management*

- and Leadership* 31, no. 1 (2020): 81–101. <https://doi.org/10.1002/nml.21412>.
- Sarman, Siti Rahayu, Saunah Zainon, Ruhaya Atan, Zarina Abu Bakar, Soo Kum Yoke, Syahrul Ahmar Ahmad, and Nur Hidayah Mohd Shaari. "The Web-Based Accountability Practices in Social Enterprises: Validating the Stakeholder Theory." *Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 243–50. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01226-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01226-5).
- Siswantoro, Dodik, Haula Rosdiana, and Heri Fathurahman. "Islamic Accountability Index of Cash Waqf Institution in Indonesia." *Competition and Cooperation in Economics and Business*, 2018, 47–54. <https://doi.org/10.1201/9781315225227>.
- Wahyuni-TD, Ika Sari, Hasnah Haron, and Yudi Fernando. "The Effects of Good Governance and Fraud Prevention on Performance of The Zakat Institutions in Indonesia: A Shari'ah Forensic Accounting Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2021. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089>.
- Widiastuti, Tika, Eko Fajar Cahyono, Siti Zulaikha, Imron Mawardi, and Muhammad Ubaidillah AlMustofa. "Optimizing Zakat Governance in East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech)." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): 301–19. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>.

Endnotes

1. Euis Amalia, "The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 162, no. Iclj 2017 (2018): 133–38, <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>.
2. Kementrian Agama RI, "Rakornas Zakat 2023, Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat Nasional," Kemenag.co.id, 2023.
3. Humas Baznas, "BAZNAS: Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun," 2020, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.
4. Ascarya and Diana Yumanita, "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya," *Bank Sentral Indonesia*, 2018.
5. Hetty Hikmaningsih and Bambang Agus Pramuka, "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'Ah Enterprise Theory (Set)," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 9 (2020): 358–67, <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>.
6. Puskas BAZNAS, *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Puskas BAZNAS (Jakarta: Puskas Baznas, 2019).
7. Puskas BAZNAS.
8. Noel Hyndman and Danielle McConville, "Trust and Accountability in UK Charities: Exploring the Virtuous Circle," *British Accounting Review*, 2017, 1–11, <https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.004>.
9. Novendi Arkham Muhtadi, "Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution," *Hasanuddin Economics and Business Review* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.26487/hebr.v3i1.1544>.
10. Cynthia Van Hule and Nico Dewaelheyns, "Why Do Private Non-Profit Organization Provide Information On The Internet?," *Social Enterorise Journal* 10, no. 1 (2014): 69–86.
11. Gina Rossi, Chiara Leardini, and Stefano Landi, "The More You Know, The

- More You Give: Influence of Online Disclosure on European Community Foundations' Donations," *Nonprofit Management and Leadership* 31, no. 1 (2020): 81–101, <https://doi.org/10.1002/nml.21412>.
12. Rossi, Leardini, and Landi.
 13. Zaimah Abdullah et al., "Zakat Institutions' Adoption of Social Media," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0013>.
 14. Rini Rini, "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, no. 95 (2016): 288–306, <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022>.
 15. Nina Karina Karim et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 18, no. 2 (2019): 13–28.
 16. Emzir Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cetakan 6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
 17. Puskas BAZNAS, *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*.
 18. Francesco Dainelli, Giacomo Manetti, and Barbara Sibilio, "Web-Based Accountability Practices in Non-Profit Organizations: The Case of National Museums," *Voluntas* 24, no. 3 (2013): 649–65, <https://doi.org/10.1007/s11266-012-9278-9>.
 19. Siti Rahayu Sarman et al., "The Web-Based Accountability Practices in Social Enterprises: Validating the Stakeholder Theory," *Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 243–50, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01226-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01226-5).
 20. Dodik Siswanto, Haula Rosdiana, and Heri Fathurahman, "Islamic Accountability Index of Cash Waqf Institution in Indonesia," *Competition and Cooperation in Economics and Business*, 2018, 47–54, <https://doi.org/10.1201/9781315225227>.
 21. Ascarya, "Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif," *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Di Universitas Trisakti*, 2005, 1–52.

22. Direktur Jenderal Pajak, "Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat," 2022.
23. Puskas BAZNAS, *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*.
24. Puskas BAZNAS.
25. Humas Baznas, "Jaga Kepercayaan Masyarakat, BAZNAS Konsisten Terapkan Prinsip 3A Dalam Pengelolaan Zakat 1 Agustus 2022," 2022.
26. Karim et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia."
27. Euis Amalia, "Good Governance for Zakat Institutions in Indonesia: A Confirmatory Factor Analysis," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 27, no. 3 (2019): 1815–27.
28. Muhammad Syafii Antonio et al., "Optimizing Zakat Collection in the Digital Era : Muzakki's Perception," *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 235–54.
29. Prabowo Yudo Jayanto and Siti Munawaroh, "The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Trust on Interest in Paying Zakat of Profession," *Jurnal Dinamika Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 59–69, <https://doi.org/10.15294/jda.v11i1.18729>.
30. Mohammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf, and Moh Takwil, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzzaki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amah Umat," *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020): 112–25.
31. Dainelli, Manetti, and Sibilio, "Web-Based Accountability Practices in Non-Profit Organizations: The Case of National Museums."
32. Sarman et al., "The Web-Based Accountability Practices in Social Enterprises: Validating the Stakeholder Theory."
33. Siswanto, Rosdiana, and Fathurahman, "Islamic Accountability Index of Cash Waqf Institution in Indonesia."

34. Juan L. Gandía, "Internet Disclosure by Nonprofit Organizations: Empirical Evidence of Nongovernmental Organizations for Development in Spain," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 40, no. 1 (2011): 57–78, <https://doi.org/10.1177/0899764009343782>.
35. Siswantoro, Rosdiana, and Fathurahman, "Islamic Accountability Index of Cash Waqf Institution in Indonesia."
36. Sarman et al., "The Web-Based Accountability Practices in Social Enterprises: Validating the Stakeholder Theory."
37. Rini, "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat."
38. Hyndman and McConville, "Trust and Accountability in UK Charities: Exploring the Virtuous Circle."
39. Ika Sari Wahyuni-TD, Hasnah Haron, and Yudi Fernando, "The Effects of Good Governance and Fraud Prevention on Performance of The Zakat Institutions in Indonesia: A Shari'ah Forensic Accounting Perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2021, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089>.
40. Nurlis and Winwin Yudiati, "The Influence of Internal Control Effectiveness , Information Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City)," *Research Journal of Finance and Accounting* 8, no. 12 (2017): 111–24.
41. Tika Widiastuti et al., "Optimizing Zakat Governance in East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech)," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): 301–19, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>.